

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseteruan Jepang dan Korea Selatan sudah terjadi sejak kolonialisme Jepang di Semenanjung Korea yang berlangsung dari tahun 1910 hingga 1945. Jepang dan Korea Selatan tidak pernah menjadi mitra yang mudah meskipun keduanya telah lama menjadi demokrasi yang terkonsolidasi dengan baik. Perselisihan sejarah dan teritorial secara konsisten merusak hubungan bilateral. Pasalnya, masa kolonialisme di semenanjung Korea sudah berakhir sejak 75 tahun yang lalu, tetapi polemik antar kedua negara belum juga berakhir. Kekejaman yang dilakukan oleh Jepang saat masa penjajahan belum secara penuh dilupakan oleh Korea Selatan hingga abad ke-21. Kekejaman yang dilakukan selama masa penjajahan, yaitu menjadikan para wanita Korea Selatan sebagai “wanita penghibur” atau yang dalam istilah Jepang dikenal dengan “*Jugun Ianfu*” dan kerja paksa (*romusha*) warga negara Korea Selatan di perusahaan-perusahaan Jepang seperti Nippon Steel juga masih meninggalkan luka hati bagi warga negara Korea Selatan, khususnya bagi warga negara yang memiliki keluarga sebagai korban dari masa penjajahan tersebut. (CNBC Indonesia, 12 Agustus 2019). Selain permasalahan sejarah penjajahan, sengketa teritorial juga belum berakhir, yakni perebutan Pulau Dokdo (bagi Korea Selatan) atau Pulau Takeshima (bagi Jepang) yang sudah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II dan mulai memanas pada tahun 2012 saat Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan menyatakan bahwa secara historis maupun yuridis pulau tersebut adalah milik Jepang (Setiawati, 2019).

Hubungan diplomatik Korea Selatan dan Jepang mulai terjalin sejak 1965 setelah mengalami negosiasi panjang dari tahun 1951 mengingat masa pendudukan Jepang di semenanjung Korea selama 35 tahun yang masih membuat kedua negara ini memiliki dua pandangan yang berbeda

terhadap sejarah masa lalu. Hubungan diplomatik ini dimulai dengan isi perjanjian antara Jepang dan Korea Selatan yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1965 karena kepentingan masing-masing negara. Pemerintah Korea Selatan telah merancang Rencana Pengembangan Ekonomi 5 Tahun dan ingin menarik modal asing, sedangkan kepentingan Jepang yaitu ingin memasuki pasar Korea Selatan. Hubungan Diplomatik Jepang dan Korea Selatan resmi terjalin, akan tetapi situasi dalam negeri Korea Selatan menjadi kacau karena masih banyak warga negara yang tidak setuju untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Jepang (KBS World, 24 Maret 2015). Jepang juga mengakui bahwa Korea Selatan adalah negara “tetangga” yang memiliki banyak persamaan (seperti hal demokrasi, zona bebas berlayar, dsb.) dan merupakan mitra sangat penting bagi Jepang. Tantangan yang dihadapi oleh Korea Selatan dan Jepang adalah sama, yakni Korea Utara. Jika Korea Utara menyerang Korea Selatan, maka tentara Amerika Serikat yang berpangkalan di Jepang akan melibatkan diri (CNBC Indonesia, 12 Agustus 2019). Jepang dan Korea Selatan juga memiliki hubungan dagang yang menguntungkan. Korea Selatan merupakan negara ketiga tujuan ekspor Jepang, atau 7,1 persen dari total ekspor US\$ 738,2 miliar. Sementara Jepang menempati peringkat kelima tujuan ekspor Korea Selatan, atau 5,1 persen dari total ekspor US\$ 605,2 miliar (Lidwina, 2019).

Jepang dan Korea Selatan kembali berkonflik pada 1 Juli 2019 saat Jepang mengumumkan kebijakan pembatasan ekspor bahan baku untuk industri semikonduktor terhadap Korea Selatan yang diberlakukan sejak 4 Juli 2019. Berdasarkan hasil wawancara eksklusif oleh media CNBC Indonesia bersama Duta Besar Jepang di Indonesia yaitu Masafumi Ishii, beliau menyatakan bahwa hal ini berkaitan dengan isu administrasi ekspor. Jepang mencoba untuk mengendalikan pergerakan material yang dilarang untuk diperdagangkan, seperti perdagangan material sensitif atau yang dilarang oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beberapa tahun terakhir Jepang menemukan pergerakan barang-barang yang tidak biasa yang melibatkan Korea Selatan, itulah yang

mendasari Jepang mengubah sistem perizinan ekspor Korea Selatan sebagai mitra spesial yang mendapatkan perlakuan khusus atau dikenal dengan istilah negara yang masuk dalam “*white list*” pengeksportan material untuk industri semikonduktor tersebut menjadi negara yang masuk ke dalam *list* standar seperti negara-negara ASEAN lainnya. Jepang hanya mengubah sistem tersebut menjadi *case by case* untuk sejumlah item agar tidak terjadi pengeksportan massal (CNBC Indonesia, 12 Agustus 2019).

Dilansir dari media VOA Indonesia, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga juga menyatakan bahwa tindakan pembatasan ekspor tersebut dilakukan bukan pembalasan atas keputusan pengadilan Korea Selatan. Menurut Jepang, sistem dan operasi kontrol ekspor Korea Selatan dinilai tidak memadai sehingga tidak layak untuk mendapat perlakuan khusus. Korea Selatan kini masuk dalam kelas standar bagi pengeksportan dari Jepang (VOA Indonesia, 7 Agustus 2019). Sebelum adanya kebijakan pembatasan ekspor bahan untuk industri semikonduktor oleh Jepang ini, diketahui pada akhir 2018, Mahkamah Agung Korea Selatan mengklaim sejumlah perusahaan Jepang untuk memberikan kompensasi kepada warga negara Korea Selatan atau keturunan warga negara tersebut yang dipaksa bekerja untuk perusahaan Jepang selama pendudukan Jepang di Semenanjung Korea dari tahun 1910 hingga 1945. Akan tetapi, Jepang berpendapat bahwa semua perselisihan terkait klaim tersebut sudah terselesaikan dalam perjanjian 1965 antar kedua negara. Jepang berpendapat bahwa perjanjian 1965 sudah memulihkan hubungan antara kedua negara dengan Jepang memberikan kompensasi kepada keluarga warga negara Korea Selatan yang menjadi korban dari masa penjajahan Jepang tersebut lebih dari 800 juta dolar dan sudah disetujui oleh Presiden Korea Selatan Park Chung-hee setuju untuk menormalisasi hubungan antar kedua negara (BBC News, 2 Desember 2019).

Merespons kebijakan pembatasan ekspor material untuk industri semikonduktor yang diberlakukan oleh Jepang ini, Menteri Luar Negeri Republik Korea Selatan, Kang Kyung-

wha mengadukan kebijakan Jepang ini kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Mike Pompeo) dan World Trade Organization pada 11 Juli 2019. Selain itu, Korea Selatan juga memberikan intensif kepada perusahaan-perusahaan lokal agar mengurangi ketergantungan terhadap Jepang dan membentuk badan darurat untuk mencari solusi lain sebagai alternatif tambahan bahan baku semikonduktor yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan khususnya Samsung dan SH Hnyx. Pasalnya, Data Dinas Beacukai Korea Selatan menunjukkan bahwa ekspor Korea Selatan selama 20 hari pertama pada bulan Juli 2019 menurun 14% dan penjualan semikonduktor turun 30%. Jika pasokan *chip* global berkurang karena pembatasan ekspor bahan baku semikonduktor tersebut, maka akan berdampak terhadap kenaikan harga *chip* yang otomatis juga akan menaikkan harga *gadget*. Respon terhadap kebijakan Jepang tersebut juga membuat Korea Selatan bertindak “sentimen” anti produk-produk Jepang seperti mobil dan bir, mengurangi wisatawan Korea Selatan ke Jepang, hingga menolak untuk adanya tontonan anime jepang yang merupakan salah satu budaya dari negeri sakura tersebut (CNBC Indonesia, 12 Agustus 2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengajukan rumusan masalah: “Bagaimana implikasi kebijakan Jepang yang membatasi ekspor bahan baku semikonduktor ke Korea Selatan tahun 2019 bagi hubungan kedua negara?”.

C. Kerangka Pemikiran

1. Teori Sistem Politik

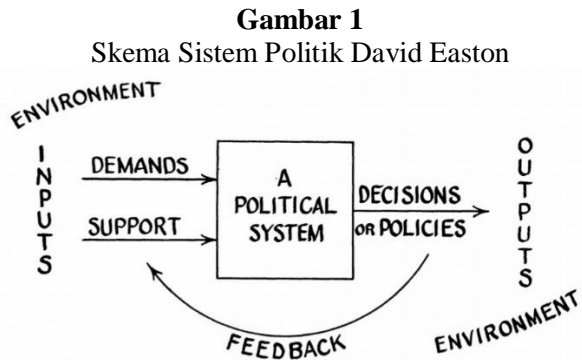
Istilah Teori Sistem secara umum pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan biologi, Ludwig von Bertalanffy. Pada awalnya teori tersebut digunakan untuk mengidentifikasi problematika dalam ilmu-ilmu eksakta yang kemudian teori ini mulai digunakan untuk bidang

ilmu lain, salah satunya ilmu sosial. Teori sistem memiliki banyak pengertian yang lebih luas, sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis mengadopsi teori sistem lebih spesifik, yakni teori sistem yang diterapkan untuk menganalisis persoalan yang berhubungan dengan dunia sosial politik.

Menurut James E. Dougherty, teori sistem ialah teori yang menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Jika terdapat perubahan pada satu variabel maka variabel lainnya juga akan mengalami perubahan. Dalam hubungan internasional, variabel dependen merupakan konsep yang hendak dijelaskan dan juga diramalkan kejadiannya. Sedangkan variabel independen yaitu konsep yang dipakai untuk menjelaskan konsep lain sebelum terjadinya variabel dependen. Dapat disimpulkan bahwa variabel dependen merupakan akibat dari variabel independen, dan sebaliknya variabel independen adalah penyebab dari terjadinya variabel dependen (Mas'ood M. , 1990). Dijelaskan oleh Kenneth Waltz bahwa sistem internasional terdiri dari sejumlah negara besar dan setiap negara berusaha untuk bertahan hidup (Saeri, 2012). Politik internasional memandang tindakan suatu negara sebagai respon atas tindakan suatu negara lain.

David Easton mengemukakan bahwa untuk membedakan sistem politik dengan sistem lainnya ialah dengan mengidentifikasi deskripsi unit-unit politik yang fundamental dan menetapkan batas-batas unit-unit di luar sistem politik. Unit-unit politik merupakan elemen-elemen yang akan membentuk sebuah sistem. Batasan dari suatu sistem politik ialah semua tindakan atau aktivitas yang berhubungan langsung dengan pembuatan keputusan (Haryanto, 1982). Keputusan-keputusan yang menyangkut tujuan negara di lingkungan eksternal, sarana dan sumber daya yang digunakan untuk mengejar tujuan itu, dan memuat tanggapan sistem politik itu terhadap tuntutan dari

lingkungan eksternal adalah keputusan-keputusan politik luar negeri (Mas'ood M. , 1989).



Sumber: *Cambridge University Press*

Sistem politik dilakukan karena adanya kepercayaan bahwa sistem tersebut mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang penting bagi masyarakat. Sistem dapat bekerja jika adanya energi untuk menggerakkannya, hal ini dimaksudkan sebagai input. Kemudian untuk hasil dari suatu sistem politik ialah *output* yang berwujud suatu keputusan atau kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan kemudian akan menjadi hubungan timbal balik dari lingkungan. Lingkungan dalam sistem politik dibedakan menjadi *Intrasocietal Environment* dan *Extrasocietal Environment*. Sistem sosial termasuk dalam *Intrasocietal Environment* yang dapat diklasifikasikan lagi ke dalam tipe-tipe struktur sosial, ekonomi, dan demografi. Sedangkan *Extrasocietal Environment* antara lain adalah sistem sosial internasional, sistem ekonomi internasional, dan sebagainya yang sama halnya dengan apa yang ada dalam lingkungan domestik (Haryanto, 1982).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu lingkungan telah diubah oleh *output* dari suatu sistem. Akan tetapi, cara paling tepat untuk menggambarkan hubungan antara sistem dengan lingkungannya ialah

sebagai hubungan timbal-balik yang dinamik, yaitu lingkungan mempengaruhi sistem, kemudian sistem mempengaruhi lingkungan, dan lingkungan yang tersebut akan mempengaruhi sistem itu lagi. Meskipun proses pembuatan keputusan dalam sistem politik sangat kompleks, unsur-unsurnya yang meliputi aktivitas penerimaan input, interpretasi input, dan penerjemahan ke dalam *output*. *Output* tersebut kemudian menjadi bagian dari lingkungan yang pada gilirannya menghasilkan input baru lagi (Mas'ood., 1989).

Penelitian kebijakan Jepang yang membatasi ekspor bahan baku semikonduktor ke Korea Selatan akan memperlihatkan bagaimana suatu sistem politik bekerja. Faktor internal yang terdapat dalam lingkungan masyarakat Jepang dan faktor eksternal yang terjadi antara Korea Selatan dan Jepang berupa konflik putusan pengadilan Korea Selatan atas perusahaan Jepang, sengketa kepulauan, dan lain sebagainya menjadi input bagi Jepang dalam membuat suatu kebijakan. Maka kemudian, kebijakan tersebutlah yang menjadi suatu output dan mempengaruhi bagaimana suatu sistem politik diterapkan. Hadirnya kebijakan Jepang inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya dinamika bagi hubungan Jepang dan Korea Selatan, juga menjadi tolak ukur apakah suatu sistem politik tersebut bekerja dengan baik atau menghasilkan suatu sistem baru.

2. Teori Pilihan Rasional

Dalam merumuskan suatu kebijakan luar negeri, tentunya setiap negara berorientasi kepada kepentingan nasional. Proses dalam membuat suatu keputusan terkait kebijakan luar negeri setiap negara memiliki pertimbangan-pertimbangan yang rasional untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dan meminimalisir kerugian. Hal ini dijelaskan oleh teori pilihan rasional atau dikenal dengan "*Rational Choice*".

James S. Coleman, seorang sosiolog yang berasal dari Amerika mengatakan bahwa pilihan rasional sama seperti paradigma tindakan nasional. Teori ini menjelaskan fenomena level makro, yang mana level makro itu adalah sistem sosial melalui pendekatan yang bersifat mikro (individu). Coleman dengan teori ini mencoba menganalisis tindakan-tindakan individu yang kemudian diakumulasikan menjadi sebuah tindakan/struktur/sistem sosial. Ada dua unsur penting dalam pilihan rasional, pertama adalah aktor sebagai pelaku tindakan sosial/individu, dan yang kedua adalah sumber daya yang diartikan sebagai hal-hal yang dikendalikan aktor untuk mencapai pemenuhan kebutuhan. Sumber daya ini bisa berupa material atau non material. Contoh yang material antara lain uang, gedung, fisik, dll. Sedangkan non material bisa dalam bentuk *trust* dan *networking*. Sumber daya merupakan segala sesuatu yang memfasilitasi/membantu aktor/individu dalam mencapai suatu tujuan. Tindakan individu berorientasi pada tujuan, dan tujuan itu akan diraih/didapat dengan cara mengerahkan semua sumberdaya yang dimiliki. Aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah interaksi akan mengerahkan semua sumber daya masing-masing untuk mendapatkan tujuannya.

Teori Pilihan Rasional merupakan model kebijakan luar negeri yang mendapat pengaruh dari *public policy literature* dan berasal dari ilmu sosiologi. Faktanya, hubungan antar negara itu merupakan gambaran makro yang tergolong dalam sosiologis. Keputusan dalam setiap hubungan antar negara dibuat oleh lembaga *legislative* dan *executive*, inilah yang menjadikan teori pilihan rasional sebagai kajian dalam proses pembuatan suatu kebijakan/keputusan (Arjawa, 2014). Para ilmuwan kebijakan luar negeri menganut pemikiran dari literatur-literatur kebijakan publik untuk menganalisis bahwasanya setiap kebijakan luar negeri dibuat melalui berbagai proses intelektual sebelum merumuskannya. William N. Dunn

menetapkan lima tahapan ideal yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan, yakni: *agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, and policy assessment*. Kemudian Charles W. Kegley dan Eugene menganalisis langkah-langkah yang ditempuh untuk membuat suatu kebijakan yang dibagi menjadi empat poin, yaitu: *problem recognition and definition, goal selection, identification of alternatives, and policy choice* (Jemadu, 2008).

Dalam penelitian kebijakan Jepang yang membatasi ekspor ke Korea Selatan, pilihan rasional digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut dianggap rasional dan mencapai tujuannya. Sebagaimana yang dikemukakan James S. Coleman unsur penting dalam pilihan rasional yaitu aktor dan sumber daya. Kebijakan yang membatasi ekspor bahan baku semikonduktor ke Korea Selatan dilakukan oleh pemerintah Jepang sebagai aktor yang merumuskan kebijakan tersebut sebagai pilihan rasional. Kemudian unsur sumber daya yang dimiliki oleh Jepang ialah hasil pertimbangan dari pelbagai lembaga pemerintahan dan dukungan masyarakat Jepang.

D. Argumentasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan teori yang penulis uraikan, argumen penelitian dari kebijakan pembatasan ekspor bahan baku semikonduktor yang diberlakukan Jepang terhadap Korea Selatan tahun 2019 akan membawa implikasi pada: pertama, terganggunya stabilitas ekonomi dan industri semikonduktor Korea Selatan. Dan yang kedua ialah munculnya ketegangan dalam relasi Jepang dan Korea Selatan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui implikasi dari kebijakan Jepang dalam pembatasan ekspor bahan baku semikonduktor ke Korea Selatan tahun 2019.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang didapat dari studi pustaka melalui peninjauan beberapa buku-buku, jurnal artikel, *website* resmi, serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini mempunyai jangkauan penelitian dari awal tahun 2019 saat Jepang memutuskan untuk membatasi ekspor bahan baku semikonduktor ke Korea Selatan hingga akhir 2019.

H. Sistematika Penulisan

Perincian skripsi yang disusun oleh penulis akan dibagi ke dalam empat bab:

1. BAB I: berisi pendahuluan, rumusan masalah, kerangka pemikiran, argumentasi, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II: membahas terkait hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan sejak terbentuknya hubungan diplomatik tahun 1965.
3. BAB III: membahas polemik terkait pembatasan ekspor bahan baku semikonduktor Jepang terhadap Korea Selatan tahun 2019 hingga implikasinya.
4. BAB IV: penutup yang menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian.